



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RDP PANJA PENINGKATAN LITERASI DAN TENAGA PERPUSTAKAAN  
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI - PEMUDA DAN  
OLAHRAGA - PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	:	2022 – 2023
Masa Sidang ke-	:	IV (Empat)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	:	1. Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten 3. Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Hari/Tanggal	:	Selasa, 21 Maret 2023
Pukul	:	12.30 WIB – Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI
Pimpinan Rapat	:	Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M./Ketua Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	:	1. Kondisi literasi di daerah, peluang dan tantangan (Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah). 2. Inovasi layanan perpustakaan. 3. Anggaran untuk literasi. 4. Kondisi ideal literasi menurut narasumber.
Hadir Komisi X DPR RI	:	13 orang dari 29 orang Anggota Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	:	1. Drs. Wahyu Haryadi, M.Si. (Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta) 2. Evi Syaefudin, S.Ag, M.Si. (Kepala Bidang Deposit Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten) 3. Fitriana, S.Sos, M.Si. (Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan) 4. M.Syafranuddin, MM (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur) 5. Saptia Hermawati, S.H., M.M. (Plh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah) 6. Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si. (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur)

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.10 WIB oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi X DPR RI.

## II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan bahan paparan (terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:

### 1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

- a. Nilai budaya literasi 2021 sebesar 67,11, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2022 sebesar 80,87, dan tingkat gemar membaca sebesar 72,36.
- b. Jumlah perpustakaan khusus dan perguruan tinggi sebanyak 359 perpustakaan (6,87%), perpustakaan sekolah 4478 perpustakaan (7,51%), dan perpustakaan umum sebanyak 393 perpustakaan (7,51%).
- c. Jumlah koleksi yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.254.662 terdiri dari koleksi stationer sebanyak 787.575, layanan paket sejumlah 352.717, dan *e-book* sejumlah 114.370 judul.
- d. Tenaga perpustakaan tahun 2022 sejumlah 1.791 orang, terdiri dari 477 orang di Perpustakaan Sekolah, 741 orang di Perpustakaan Umum, dan 573 orang di Perpustakaan Khusus dan Perguruan Tinggi. Dari jumlah ini jika dibagi dengan seluruh penduduk DKI Jakarta maka 1 orang tenaga pengelola perpustakaan melayani 5940 orang pemustaka, dimana jumlah ideal menurut IFLA adalah 1:2500 (1 orang tenaga perpustakaan melayani 2500 pemustaka).
- e. Persentase anggaran dari BOS dan BOP untuk perpustakaan pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.890.966.180.873,-, dan pada tahun 2022 sebesar Rp.2.160.964.633.301,-
- f. Melaksanakan beragam inovasi layanan perpustakaan diantaranya: IKRA (Inisiatif Keluarga Ringkas Aksara), Jalijali Fest (Festival Literasi dan Literatur Jakarta), Spot Baca Digital, *iJakarta*.
- g. Alokasi APBD untuk Perpustakaan Umum dan Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp.46.353.089.710, dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 119.474.401.676. Adapun alokasi APBN untuk perpustakaan umum dan daerah yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp.337.285.000, dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 221.902.000,-
- h. Memberikan rekomendasi, diantaranya:
  - 1) Pendelegasian kewenangan akreditasi untuk perpustakaan binaan di tingkat daerah.
  - 2) Pelaksanaan BOS dapat diperluas untuk variasi penyediaan koleksi, antara lain buku cerita anak sesuai usia/revolusi mental.
  - 3) Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca di Jakarta guna mendukung Sukses Jakarta untuk Indonesia.

## 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten

1. Provinsi Banten menempati urutan ke-11 dari 34 provinsi dengan nilai IPLM sebesar 71,03, menempati urutan ke-10 dari 34 provinsi dengan nilai capaian 65,70, kategori kegemaran membaca tinggi (dengan jumlah sampel responden 400 orang, meliputi Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang).
2. Jumlah koleksi Perpustakaan Provinsi Banten berjumlah 62.757 judul atau 181.358 eksemplar. Jumlah perpustakaan di Provinsi Banten: 1052 perpustakaan umum, 6444 perpustakaan sekolah, 67 perpustakaan perguruan tinggi dan 29 perpustakaan khusus.
3. Masih banyak perpustakaan yang belum terakreditasi karena daerah (dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi) belum bisa dilaksanakan *assessment* secara mandiri kepada asesori (perpustakaan), meskipun sudah mempunyai *assessor* daerah yang ditunjuk oleh Perpustakaan Nasional RI.
4. Inovasi perpustakaan yang telah dilakukan antara lain: kelas pemustaka, promosi perpustakaan, kunjungan pemustaka, kerja sama pinjam pakai koleksi, dan teknologi melalui *batupusaka.bantenprov.go.id*.
5. Untuk tahun 2023, anggaran khusus untuk literasi dan perpustakaan pada DPA DPK 2023 terdapat 1 program yakni program pembinaan perpustakaan, sebesar Rp3.381.664.300 dari seluruh anggaran dinas perpustakaan dan kearsipan sebesar Rp28.996.000.000.

## 3. Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan

- a. Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sumatera Selatan tahun 2024, target Perpustakaan 15,00 dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) target Perpustakaan 71,3. Provinsi Sumatera Selatan memiliki peluang dengan adanya dukungan regulasi di bidang perpustakaan dan literasi, keberadaan duta dan Bunda/Bapak literasi sebanyak 1.766 orang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- b. Jumlah perpustakaan di Sumatera Selatan adalah 8.592 dengan rincian: 1.523 perpustakaan umum, 6.156 perpustakaan sekolah, 95 perpustakaan perguruan tinggi, 818 perpustakaan khusus.
- c. Jumlah tenaga perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 adalah 190 pustakawan dan 9.613 tenaga teknis perpustakaan.
- d. Permasalahan yang dihadapi antara lain: minimnya tenaga perpustakaan, pustakawan yang diangkat melalui *inpassing* belum memiliki kemampuan kompetensi yang secara teknis harus dimiliki oleh seorang pustakawan. Kebutuhan tenaga perpustakaan adalah 7.503 orang (SNP) dan 3.230 orang (UNESCO).
- e. Inovasi yang telah dilakukan antara lain duta literasi Sumatera Selatan, *digital library* Sumatera Selatan, pojok baca desa, festival literasi, promosi perpustakaan melalui video pendek, layanan mobil perpustakaan keliling dan lain-lain.
- f. Alokasi anggaran APBD untuk perpustakaan dan literasi tahun 2023 adalah sebesar Rp20.828.179.002, dengan rincian untuk perpustakaan sebesar Rp19.673.867.002 dan literasi sebesar Rp1.154.312.000,-
- g. Rekomendasi untuk peningkatan literasi antara lain perlunya dukungan keberlanjutan dana alokasi khusus dan dekonsentrasi untuk penguatan kelembagaan dan literasi di daerah, perlu dukungan DPR RI untuk mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan kepala daerah di seluruh Indonesia untuk membuka formasi kebutuhan ASN Prodi Ilmu Perpustakaan dalam rangka memenuhi kebutuhan pustakawan di berbagai jenis perpustakaan di Indonesia dan perlunya dukungan DPR RI terhadap implementasi Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, untuk

peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat.

#### 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

- a. Beberapa inovasi layanan yang dilakukan yaitu: Menggandeng Ojeg Muslimah Samarinda, memberikan kemudahan kepada Pemustaka, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, kerja sama dengan Diknas Kaltim, meningkatkan kerja sama dengan semua perpustakaan kabupaten dan kota, memprogramkan kartu anggota elektronika (2023), membuka *drop box*, meningkatkan sarpras layanan, membuka kembali jam layanan di hari Sabtu dan Ahad, dan membuka kembali layanan hingga malam hari.
- b. Koleksi *e-book* sebesar 17.116 judul dan 104.530 copy, dengan kunjungan perpustakaan pada tahun 2022 mencapai 220.856 orang secara *onsite*, dan sebanyak 175.770 orang secara *online*.
- c. Jumlah perpustakaan desa yang menerima bantuan koleksi bahan pustaka melalui dana APBD Kalimantan Timur 2022 sebesar 30 perpustakaan yang tersebar ke 10 kabupaten/kota.
- d. Alokasi anggaran 2017-2023 yaitu: 2017 sebesar Rp21,8 M, tahun 2018 sebesar Rp20,1 M, tahun 2019 sebesar Rp25,6 M, tahun 2020 sebesar Rp24,5 M, tahun 2021 sebesar Rp25,7 M, tahun 2022 sebesar Rp27 M, APBD-P sebesar 39,7 M, dan pada tahun 2023 sebesar Rp52,8 M.
- e. Inovasi dengan melaksanakan beberapa program diantaranya: menumbuhkembangkan cinta pegawai akan dunia perpustakaan, melakukan pembinaan keperpustakaan, pembinaan pustakawan, pembinaan kepada penulis bekerjasama dengan berbagai pihak, membantu percetakan karya-karya, melakukan bedah buku, menyediakan hadiah khusus bagi pemenang lomba perpustakaan, memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota, mendorong ASN untuk menempuh pendidikan, dan menanamkan cita perpustakaan kepada pelajar SMA dan SMK melalui bimbingan teknis.

#### 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah

- a. Jumlah perpustakaan tahun 2022 sebesar 22.266, terdiri dari 2.344 di perpustakaan umum, 403 di perpustakaan khusus, 19.195 di perpustakaan sekolah, dan 324 di perpustakaan perguruan tinggi, jumlah pustakawan 385 orang.
- b. Inovasi yang dilaksanakan diantaranya: *iJateng* adalah aplikasi perpustakaan digital untuk membaca *e-book* persembahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Pujangga (Pustaka Jateng Gayeng) menyajikan koleksi-koleksi berupa naskah kuno dan koleksi lokal konten Jawa Tengah yang dapat diakses secara daring; Layanan Pojok Digital; *Library Learning Center* (LCC) merupakan aplikasi bimbingan pemakai berbasis *web* yang menyediakan informasi tentang jenis layanan perpustakaan; layanan terpadu perpustakaan sekolah; layanan terpadu perpustakaan perguruan tinggi; *field trip* perpustakaan; literasi berbasis inklusi sosial; ruang belajar modern; agen literasi Jawa Tengah; bedah buku; titik baca; layanan perpusling (khusus kelompok rentan); layanan magang perpustakaan; donasi buku; layanan perpustakaan digital; peminjaman; dan pengembangan lain dengan teknologi RFID.
- c. Alokasi APBD urusan perpustakaan pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.755.000.000,- tahun 2020 sebesar Rp.1.979.328.000, tahun 2021 sebesar Rp.2.005.916.000, tahun 2022 sebesar Rp.675.059.000, dan pada tahun 2023 sebesar Rp.1.085.315.000, yang dipergunakan untuk kegiatan:

pengembangan perpustakaan di provinsi Jawa Tengah melalui perluasan jejaring kemitraan, peningkatan kapasitas SDM perpustakaan dan pembinaan perpustakaan SMA/SMK, pembudayaan gemar membaca, dan penyelenggaraan layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah.

- d. Memberikan rekomendasi diantaranya:
- 1) Pembudayaan gemar membaca di lingkungan sekolah dan keluarga harus secara masif di upayakan dan berkelanjutan, seperti rutinitas jam literasi, gerakan *one day one book* (membaca, mendongeng, menulis), bedah buku, pameran buku, resensi buku, dan lain-lain.
  - 2) Kerja sama lintas sektor (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, antar Perangkat Daerah, Organisasi Profesi Pustakawan dan Komunitas/Pegiat Literasi) untuk bersinergi membangun perilaku budaya literasi di masyarakat.
  - 3) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
  - 4) Menjamin ketersediaan koleksi perpustakaan yang berkualitas.
  - 5) Kemudahan akses layanan perpustakaan.
  - 6) Menjadikan perpustakaan dan koleksi perpustakaan sebagai sumber informasi bagi masyarakat.
  - 7) Pengembangan jenis kegiatan yang dilaksanakan di perpustakaan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung di perpustakaan.
  - 8) Modernisasi gedung perpustakaan yang ramah kelompok rentan, sebagai wahana pendidikan dan rekreasi sehingga memiliki daya tarik untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat.
  - 9) Pelestarian/alih media naskah kuno dan kitab agama yang keberadaannya masih tersebar di masyarakat sebagai upaya menjaga warisan budaya, kekayaan dan identitas daerah yang harus diselamatkan.

#### **6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

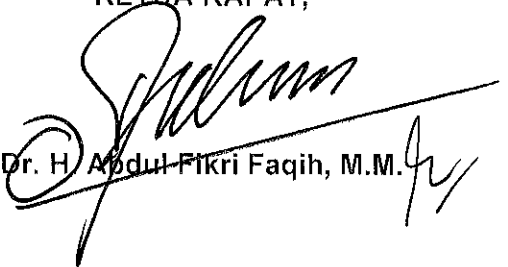
- a. Gambaran umum perkembangan literasi di Provinsi NTT: indeks pembangunan literasi masyarakat perpustakaan nasional tahun 2022 adalah 67,61, dengan tingkat kegemaran membaca pada tahun 2021 sebesar 64,84.
- b. Peluang literasi di NTT antara lain adanya komitmen dan konsistensi dari kepala daerah dan dukungan politik dari DPRD, adanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, layanan anak dan layanan terpadu perpustakaan sekolah, adanya layanan mobil perpustakaan keliling, layanan perpustakaan berbasis IT yang terintegrasi, adanya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- c. Tantangan literasi di NTT antara lain: ketersediaan layanan internet belum merata, kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan, terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan, layanan perpustakaan keliling belum menjangkau keseluruhan wilayah, terbatasnya koleksi bahan pustaka pada taman baca, terbatasnya koleksi pengayaan, belum tersedianya tenaga pengelola perpustakaan sekolah, dan tenaga pengelola perpustakaan di desa/kelurahan adalah tenaga sukarela.
- d. Inovasi layanan di perpustakaan antara lain inovasi penyediaan layanan komputer dan internet secara gratis bagi pengunjung perpustakaan, inovasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

- B. Terhadap penjelasan yang disampaikan para narasumber, Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan:
- a. Mendorong peningkatan keberpihakan, kepedulian dan inovasi dari masing-masing kepala daerah untuk pengembangan literasi di daerah.
  - b. Mendorong peningkatan ketersediaan koleksi bahan bacaan dalam rangka peningkatan literasi dan kegemaran membaca.
  - c. Mendorong peningkatan jumlah dan kualifikasi para tenaga perpustakaan, dengan penyelenggaraan peningkatan kompetensi yang terintegrasi dan penyelenggaraan bimbingan teknis.
  - d. Mendorong Perpustakaan RI untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan literasi dan memberdayakan komunitas-komunitas literasi di daerah.
- C. Substansi dari bahan paparan yang disampaikan pada RDP hari ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.29 WIB.

KETUA RAPAT,



Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.